

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap pemberitaan demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025 di dua media daring nasional, yakni Tempo.co dan Republika.co.id, ditemukan adanya perbedaan yang mencolok dalam cara masing-masing media mengonstruksi realitas peristiwa tersebut. Perbedaan ini tidak lepas dari latar belakang ideologi, pandangan redaksional, serta arah kebijakan editorial yang diusung oleh masing-masing media. Kedua institusi pers ini, meskipun sama-sama melaporkan peristiwa yang identik, menampilkan narasi yang berlawanan dalam menyampaikan makna dan pesan kepada khalayak.

Tempo.co, yang selama ini dikenal sebagai media dengan semangat kritis dan progresif, secara konsisten membingkai demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi militer dalam ranah sipil. Melalui pendekatan analisis *framing* Robert N. Entman, media ini menekankan elemen *define problems* pada munculnya ancaman atas supremasi sipil, serta kekhawatiran akan kembalinya praktik dwifungsi militer. Dalam kerangka *diagnose causes*, Tempo menunjukkan bahwa sumber persoalan utama berasal dari aktor negara, terutama DPR dan institusi militer, yang mendorong percepatan pengesahan RUU tanpa partisipasi publik yang memadai. Sementara itu, dari sisi *make moral judgement*, media ini memberikan penilaian kritis terhadap langkah-langkah pemerintah,

serta mengafirmasi legitimasi gerakan massa sebagai manifestasi kepentingan rakyat. Kemudian pada *treatment recommendation* Solusi yang ditawarkan dalam bingkai Tempo mencakup penolakan atas pengesahan RUU TNI dan seruan untuk melanjutkan agenda reformasi militer secara menyeluruh dan partisipatif.

Berbeda dengan Tempo.co, Republika.co.id menyajikan pemberitaan yang lebih berhati-hati dan cenderung moderat. Fokus utama pemberitaan Republika terletak pada aspek penekanan pada dampak negatif aksi terhadap ketertiban. Dalam elemen *define problems*, demonstrasi dikonstruksikan sebagai potensi ancaman terhadap ketertiban umum, terutama karena adanya tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Melalui elemen *diagnose causes*, Republika menyoroti perilaku sebagian demonstran yang dinilai anarkis sebagai penyebab utama keributan, alih-alih mengkritisi substansi RUU itu sendiri. Sementara dalam *make moral judgement*, media ini membingkai negara dan aparat sebagai pihak yang sah dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban. Adapun *treatment recommendation* solusi yang diangkat lebih bersifat normatif, yakni dengan mendorong penyelesaian melalui dialog, penegakan hukum, dan stabilitas sosial.

Perbedaan pendekatan yang ditunjukkan oleh kedua media tersebut mencerminkan bagaimana media bukan sekadar penyampai informasi yang netral, melainkan merupakan aktor aktif yang turut membentuk konstruksi sosial atas suatu peristiwa. Proses pemilihan isu, penyusunan narasi, dan penonjolan aspek-aspek tertentu menjadi mekanisme pembingkai yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, serta kepentingan yang melekat pada institusi media. Dalam

konteks ini, dapat dikatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk mengarahkan cara pandang publik, memengaruhi opini, dan bahkan membentuk konsensus sosial tertentu.

Fenomena ini sejalan dengan perspektif konstruktivis yang memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan statis, melainkan merupakan hasil dari konstruksi yang terus-menerus melalui interaksi sosial, termasuk interaksi yang terjadi antara media dan khalayak. Konsep teori konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann serta model *Hierarchy of Influence* yang dikembangkan oleh Pamela Shoemaker dan Reese menguatkan bahwa dalam setiap berita terkandung tingkatan pengaruh yang kompleks, mulai dari individu jurnalis, rutinitas redaksional, hingga ideologi media itu sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran media dalam menyampaikan berita tidak pernah sepenuhnya bebas nilai. Media justru memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan bagaimana sebuah isu dipersepsikan oleh publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap cara kerja media dan bagaimana mereka membingkai suatu isu menjadi sangat penting dalam menganalisis dinamika sosial-politik di masyarakat. Penelitian ini juga mengajak pembaca untuk lebih kritis terhadap narasi yang disajikan media dan menyadari bahwa satu peristiwa bisa memiliki banyak wajah tergantung dari lensa siapa yang mengabarkannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan kembali relevansi teori *framing* Robert N. Entman dalam menganalisis konstruksi media terhadap suatu peristiwa. Empat elemen utama dalam model Entman terbukti efektif dalam mengungkap perbedaan sudut pandang antara media yang membingkai isu yang sama. Dengan pendekatan ini, *framing* menjadi alat penting untuk memahami bagaimana media memilih, menyoroti, dan mengabaikan aspek-aspek tertentu guna membentuk opini publik.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat paradigma konstruktivis dan teori konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann, yang menekankan bahwa realitas media adalah hasil konstruksi sosial, bukan cerminan objektif atas peristiwa. Model *Hierarchy of Influences* dari Shoemaker dan Reese juga relevan dalam menjelaskan bahwa isi media dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari individu jurnalis hingga ideologi media itu sendiri. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan dalam kajian komunikasi dan jurnalisme.

5.2.2 Saran Praktis

Penelitian ini menghasilkan saran praktis yang dapat ditujukan kepada berbagai pihak, terutama dalam konteks pemberitaan isu-isu sosial dan politik di era media digital. Bagi masyarakat sebagai audiens media, penting untuk meningkatkan literasi informasi agar lebih kritis dalam menyikapi pemberitaan yang diterima. Masyarakat perlu memahami bahwa berita yang disajikan media

merupakan hasil konstruksi, bukan representasi objektif dari realitas. Oleh karena itu, disarankan agar pembaca tidak bergantung pada satu sumber berita saja, melainkan membandingkan berbagai perspektif dari media yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu peristiwa.

Di sisi lain, praktisi media dan jurnalis diharapkan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika jurnalistik, terutama dalam peliputan isu yang menyangkut kepentingan publik. Profesionalisme harus dijaga dengan menyajikan informasi secara berimbang, akurat, dan tidak memihak. Pemerintah juga disarankan untuk lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi yang disuarakan melalui media, serta tidak bersikap represif terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai *framing* media dan pengaruhnya terhadap opini publik, khususnya melalui pendekatan interdisipliner yang lebih luas dan mendalam.